



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2011-2012**

JUM'AT, 28 OKTOBER 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2011



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2011-2012**

JUM'AT, 28 OKTOBER 2011

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,

- **Para Wakil Ketua DPR-RI,**
- **Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan,**
- **Para Anggota Dewan,**

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada hari ini, Dewan akan menutup Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012 yang sudah berlangsung sejak tanggal 16 Agustus 2011 yang lalu. Hari ini bersamaan pula dengan Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-83. Dalam kaitan peringatan ini, kita perlu mengajak segenap komponen bangsa untuk memperkuat komitmen

kebangsaan, persatuan dan kesatuan, sebagaimana jiwa dan semangat Sumpah Pemuda yang digelorakan pada tahun 1928.

Masa Sidang I DPR RI telah berjalan selama 48 hari kerja. Walaupun kurang dari dua bulan, namun relatif banyak yang dilakukan terkait tugas dan fungsi Dewan di bidang legislasi, penetapan anggaran, pengawasan, dan memberikan rekomendasi serta penetapan pejabat publik, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Rekomendasi dan penetapan pejabat publik yang di maksud adalah rekomentasi atas calon Duta-duta Besar LBBP-RI untuk negara-negara sahabat yang diajukan oleh Presiden. Pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Negara Sahabat untuk Republik Indonesia, yaitu Republik Belarus, Filipina, Serbia, Luksemburg, Republik Islam Afganistan, Kerajaan Arab Saudi, Republik Pantai Gading dan Republik Bosnia Herzegovina. Penetapan 6 (enam) Calon Hakim Agung, penetapan calon Anggota BPK-RI. Adapun penetapan calon pimpinan KPK, dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan lainnya, dua calon Deputi Gubernur BI, Anggota Komisi Haji Indonesia, anggota Dewan pengawasn LPP-TVRI masih dalam proses.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pimpinan Dewan berharap, bahwa Dewan harus lebih fokus pada pelaksanaan fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi harus

dilakukan secara efisien, efektif, dan tepat waktu, karena Dewan harus dapat menyelesaikan pembahasan setiap RUU yang hanya dialokasikan dalam 2 (dua) kali Masa Sidang, dan dapat ditambah 1 (satu) kali Masa Sidang bila belum dapat diselesaikan. Pimpinan Dewan mengingatkan segenap Anggota Komisi-Komisi, Pansus dan Badan Legislasi, untuk meningkatkan kedisiplinan dalam hal kehadiran dalam rapat-rapat pembahasan RUU, baik di Komisi, Pansus, Baleg maupun pada Rapat-Rapat Paripurna.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2011, telah diselesaikan 8 (delapan) RUU yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Bantuan Hukum, RUU tentang Intelijen Negara, RUU tentang Rumah Susun, RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), RUU tentang Pengelolaan Zakat, dan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tiga RUU Kumulatif Terbuka juga telah diselesaikan, di antaranya RUU APBN 2012.

Dari seluruh RUU yang telah mendapatkan persetujuan, khusus RUU tentang BPJS telah mengalami pembahasan yang sangat mendalam, karena UU ini sangat dinantikan oleh masyarakat. RUU tentang BPJS ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat UUD 1945 alinea ke-4, sila ke-5 Pancasila, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

yang menghendaki bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan melalui sebuah badan penyelenggara yang dibentuk dengan UU.

Pembahasan RUU tentang BPJS ini telah mengalami perpanjangan masa tugas karena banyaknya DIM yang harus diselesaikan serta banyaknya materi yang cukup krusial. Pada pembahasan atas RUU ini, 9 (sembilan) fraksi DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu, BPJS-1 menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan, BPJS-2 menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

Substansi yang sangat krusial dalam pembahasan RUU ini adalah tentang **awal mulai beroperasinya BPJS-2**. Awalnya, Pemerintah dan sebagian fraksi DPR-RI menginginkan beroperasinya BPJS-2 selambat-lambatnya tahun 2016, sedang sebagian fraksi menginginkan BPJS-2 beroperasi pada tahun 2014. Akhirnya, **dengan semangat kebersamaan, dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia, maka DPR-RI dengan suara bulat telah menyepakati RUU tentang BPJS disetujui untuk disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna hari ini menjelang penutupan sidang**. Hasil kesepakatan fraksi-fraksi dan Pemerintah, BPJS-2 diberlakukan pada tahun 2014, tetapi operasionalnya selambat-lambatnya pada bulan Juli 2015.

RUU lain yang mendapatkan perhatian adalah RUU tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini bertujuan *pertama*, untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum agar mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala

warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum di bidang keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. *Ketiga*, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UU ini.

Dewan juga menyambut baik telah selesainya pembahasan atas RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). RUU ini cukup lama dibahas karena adanya substansi yang cukup krusial terutama berkaitan dengan masalah struktur Dewan Komisiner, Tata-Cara Pemilihan Dewan Komisiner OJK, kewenangan penuntutan oleh OJK, dan batas waktu peralihan (transisi).

RUU tentang Penyelenggara Pemilu yang sudah diselesaikan sangat terkait dengan RUU Pemilu Legislatif yang akan segera dibahas oleh Panitia Khusus DPR-RI bersama Pemerintah. Saat ini, Pemerintah sudah mempersiapkan DIM yang akan menjadi dasar pembahasan RUU Pemilu Legislatif. Diperkirakan, pembahasannya akan berlanjut pada Masa Sidang II dan III. Dengan demikian, pada kurun waktu sekitar 30 bulan sebelum hari pemungutan suara, diharapkan tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah dapat dimulai. Hal yang patut dicermati dalam pembahasan RUU Pemilu adalah

beberapa substansi yang dapat menjadi *pending matters* oleh Fraksi-fraksi DPR-RI diantaranya, terkait masalah *parliamentary threshold*, konversi suara menjadi kursi, masalah sistem Pemilu, proses peradilan Pemilu, dan hal-hal terkait dengan Daerah Pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR-RI.

RUU tentang Intelijen Negara telah disetujui untuk disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna tanggal 11 Oktober 2011. Undang undang tentang Intelijen Negara dimaksudkan untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan intelijen di Indonesia, mengingat dinamika perkembangan strategis yang mengalami perubahan begitu kompleks, baik ditingkat global maupun regional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan telah menyelesaikan pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2012 tepat 2 (dua) bulan sebelum APBN dimulai pada 1 Januari 2012. Beberapa poin penting yang disepakati dan disetujui Dewan antara lain: target Pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar 6,7%, Inflasi 5,3%, Kurs rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp.8.800,-, Tingkat suku bunga SBN sebesar 6,0%, target lifting minyak mentah sebesar 950.000 barel per hari, dan harga patokan minyak mentah Indonesia USD 90,00 per barel. Dewan mengingatkan Pemerintah untuk tetap mengantisipasi perkembangan ekonomi dan keuangan global serta berupaya memperkuat fundamental makro ekonomi dalam negeri, agar tidak terimbas krisis finansial seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat.

Dalam kaitan dengan kebijakan fiskal 2012 mendatang, Dewan **belum menyetujui** rencana Pemerintah menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Pemerintah diminta melakukan kajian Tarif Tenaga Listrik yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek kemampuan bayar konsumen, inflasi, dan dampaknya, hanya pada beberapa industri, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, antara lain suplai energi primer, dampaknya bagi industri kecil dan menengah, dampak sosial maupun perekonomian secara keseluruhan. Komisi Dewan juga meminta Pemerintah melakukan upaya-upaya penurunan Biaya Pokok Produksi (BPP Listrik) dengan merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Sektor Hulu Listrik pada PT. PLN (Persero), BP. Migas, dan Kementerian ESDM-RI tertanggal 16 September 2011. Dewan mengingatkan PLN, untuk terus menambah ketersediaan listrik karena semakin meningkatnya kebutuhan listrik 5-10 tahun ke depan.

Masih dalam kaitan dengan kebijakan energi, Dewan juga **belum menyetujui** untuk menambah kuota BBM tahun 2012, dan mempertanyakan kesiapan Pemerintah dalam melakukan pembatasan penggunaan BBM tahun 2012 mendatang. Kuota volume BBM bersubsidi tahun 2012 disetujui berjumlah 37,5 kilo liter, total kuota BBM bersubsidi berdasarkan APBN-P 2011 adalah sebesar 40 juta KL. Pemerintah perlu melaksanakan terobosan, agar realisasi distribusi BBM bersubsidi tidak melebihi kuota atau bahkan lebih rendah dari volume yang sudah ditetapkan, sehingga diharapkan tidak ada perubahan melalui APBN-P 2012.

Sidang Dewan yang terhormat,

Keputusan Rapat Dewan Gubernur BI pada tanggal 11 Oktober 2011 yang menetapkan untuk menurunkan suku bunga acuan BI rate sebesar 0,25% dari 6,75% merupakan langkah maju dan positif. Dewan mendukung kebijakan tersebut, namun tetap meminta otoritas moneter memonitor perkembangan di pasar uang. Kebijakan penurunan suku bunga merupakan momentum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari konsumsi domestik, dan perkembangan sektor riil diharapkan akan meningkat. Dewan yakin BI telah mengkaji dan sangat hati-hati dalam menurunkan suku bunga, telah memperhitungkan faktor inflasi, memantau perkembangan tingkat suku bunga perbankan serta perkembangan jumlah uang beredar di pasar.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada Masa Sidang I ini, banyak masalah-masalah berkembang yang dipantau, dicermati dan dibahas oleh Komisi-Komisi Dewan dengan Pemerintah, diantaranya adalah maraknya kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh sebagian *content provider* melalui layanan berbagai operator telekomunikasi. Untuk hal ini, Komisi I membentuk Panitia Kerja dalam mendalami persoalan regulasi telekomunikasi dan praktek-praktek penipuan yang terjadi serta perlindungan hak-hak konsumen telekomunikasi.

Persoalan lainnya yang kini juga mendapat perhatian Dewan adalah tapal batas negara kita yang seringkali menimbulkan masalah. Hal ini menjadi perhatian, tidak hanya Komisi I, tetapi juga Komisi II. Masalah yang mengemuka akhir akhir ini adalah wilayah perbatasan Tanjung Barat dan Camar Bulan di Kalimantan Barat. Dalam hal tapal batas negara tidak ada kata lain kita semua, DPR dan Pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konsisten. Bukan hanya yang terdapat di Pulau Kalimantan, tetapi juga di wilayah lain di seluruh Indonesia. Tapal batas sangat penting untuk mendapatkan kejelasan, karena terkait dengan kedaulatan negara kita. Karena itu harus dihindari terjadinya pengambilalihan wilayah kita oleh negara lain.

Bahwa masalah perbatasan bukan semata-mata berhubungan dengan keamanan saja tetapi juga kesejahteraan rakyat kita yang tinggal di kawasan ini. Buruknya sarana transportasi dan air bersih, terbatasnya layanan pendidikan dan kesehatan, serta sulitnya memasarkan hasil bumi yang didapat, menjadi salah satu alasan bagi masyarakat di perbatasan untuk lebih banyak berinteraksi dengan negara tetangga. Karena itu, Pimpinan Dewan mengharapkan agar munculnya masalah perbatasan di kedua desa tersebut hendaknya menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih giat membangun kawasan perbatasan, agar benar-benar menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam Rapat Kerja Komisi Dewan dengan pemerintah, khususnya dengan Menpan dan Reformasi Birokrasi, kepala BPKP dan Kepala BKN, telah dibahas mengenai penataan kepegawaian secara nasional. Dewan mengharapkan, agar rencana Pemerintah untuk melakukan moratorium PNS mulai 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012 berlaku efektif dan tepat sasaran. Dewan meminta kementerian ini, untuk segera menyelaraskan jumlah, kualitas, distribusi dan komposisi PNS secara nasional, baik dalam satuan unit organisasi maupun antar instansi, antara pusat dan daerah maupun antardaerah. Pemerintah diminta melakukan supervisi, memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan analisis jabatan, menghitung kebutuhan jumlah pegawai secara riil, dan menyempurnakan sistem rekrutmen CPNS.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan, Tim Pengawas Kasus Bank Century telah melakukan beberapa kali rapat, antara lain dengan KPK, Polri dan Kejaksaan. Tim Pengawas Century meminta agar penegak hukum terus mengoptimalkan menuntaskan semua perkara yang masih menjadi tanggungjawab nya dan meningkatkan koordinasi dalam mempercepat proses *Mutual Legal Assistance* (MLA). Juga diminta untuk dapat mempercepat proses pengembalian aset dan mempercepat proses penyelesaian ganti rugi nasabah Antaboga Delta Sekuritas.

Panitia-panitia kerja yang telah dibentuk oleh beberapa alat kelengkapan Dewan melanjutkan kegiatan untuk lebih memperdalam materi bahasan yang dilakukan oleh Komisi-Komisi Dewan. Dalam

masa sidang ini Tim Pengawas Haji DPR-RI juga telah memberangkatkan anggotanya ke Arab Saudi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah Haji tahun 2011. Tim ini di ketuai oleh Ketua DPR-RI dengan tugas antara lain menggali fakta dan temuan yang relevan sebagai masukan kepada Komisi-Komisi DPR RI dalam menyusun kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Berkaitan dengan masalah keamanan, masyarakat, Pemerintah, dan kalangan Dewan sangat prihatin terhadap tindakan teror dan kekerasan yang membawa korban jiwa, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya Papua. Terakhir, tidak kurang dari 8 (delapan) orang meninggal, termasuk tewasnya Kapolsek Mulia pada saat menjalankan tugas. Berkaitan dengan hal itu, Dewan meminta perhatian Pemerintah agar semua bentuk kekerasan harus dapat dihentikan. Situasi di wilayah Papua telah menimbulkan ketakutan masyarakat termasuk para karyawan PT. Freeport Indonesia. Dewan juga memberikan dukungan terhadap tindakan tegas dari aparat keamanan yang telah melakukan penangkapan terhadap beberapa anggota Panitia Kongres III Rakyat Papua baru-baru ini. Tindakan tegas perlu diambil, karena kongres telah dijadikan ajang untuk melakukan tindakan makar terhadap NKRI. Harus dilakukan dialog untuk mencari solusi bagi penuntasan berbagai persoalan di Papua.

Permasalahan lain yang mendapatkan perhatian Dewan adalah berkaitan dengan kondisi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, terutama dari segi keselamatan. Dewasa ini jumlah tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi telah

mencapai 43 orang, dengan rincian 24 orang sudah divonis hukuman mati, sementara 19 orang lainnya sedang dalam penyelidikan.

Dewan mendesak Pemerintah agar secepatnya memanfaatkan waktu yang ada untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan terhadap warga negara kita yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, termasuk di negara lain seperti Malaysia dan Singapura.

Kedepan, Pimpinan dewan meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pergerah tenaga kerja yang terbukti telah melakukan pelanggaran. Di samping itu, pemerintah hendaknya selalu menggalang kerjasama dengan negara-negara tujuan, agar pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dapat lebih tertata secara baik, sehingga upaya penyelamatan dan pengamanannya lebih mudah dilakukan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Beberapa hari yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan perombakan (*reshuffle*) Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam perombakan ini, ada beberapa wajah baru yang duduk dalam kabinet, ada pergeseran menteri, dan ada pergantian menteri dari Partai politik oleh kalangan profesional. Juga telah diangkat wakil-wakil menteri untuk memperkuat Kabinet Indonesia Bersatu II.

Perombakan ini adalah hak prerogatif Presiden. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk dilakukan perombakan, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah yang masih memiliki sisa waktu bekerja kurang dari 3 (tiga) tahun. Perombakan kabinet, memberikan harapan

sekaligus juga membawa tanggungjawab besar bagi anggota kabinet untuk dapat memenuhi harapan masyarakat. Dewan percaya bahwa niat baik Presiden dalam melakukan *reshuffle* adalah disemangati oleh keinginan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan rakyat Indonesia. Dewan meyakini bahwa *reshuffle* dimaksudkan untuk mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan. Hasil *reshuffle* akan memberikan dampak positif bagi terjaminnya penegakan hukum yang semakin adil dan berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum yang berpihak pada keadilan dan kebenaran. Dewan juga berharap akan tetap terjaga hubungan kemitraan antara Dewan dan Pemerintah, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip dan mekanisme *check and balances* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ke depan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam masa sidang ini, cukup banyak peran DPR dalam meningkatkan diplomasi parlemen melalui berbagai kegiatan, baik di dalam konferensi yang bersifat regional/internasional di beberapa negara, maupun yang telah dilaksanakan di Indonesia.

Pada pertengahan bulan September 2011, telah dilakukan Sidang Umum *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) ke-32 di Phnom Penh Kamboja. Menjelang akhir penutupan sidang, sesuai dengan Statuta AIPA dan regulasi yang telah disepakati bersama, maka Ketua DPR-RI terpilih menjadi Presiden AIPA untuk kurun waktu satu tahun. Diterimanya jabatan Presiden AIPA oleh Ketua DPR-Ri adalah bersamaan waktu dengan kepemimpinan Indonesia di

ASEAN sampai dengan tahun 2012. Ini akan makin meneguhkan komitmen Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai jangkar hubungan regional utama.

Dalam kapasitas Ketua DPR-RI sebagai Presiden AIPA periode 2011-2012, DPR-RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Umum ke-33 AIPA yang akan diselenggarakan dari tanggal 16 sampai 22 September 2012 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Salah satu kegiatan penting yang perlu disampaikan disini adalah *APA Conference on Principles of Friendship and Cooperation in Asia and ad hoc Committee Meeting on The Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia* yang berlangsung di Solo, tanggal 28-29 September 2011. Dalam pertemuan *Asia Parliamentary Assembly* tersebut, sidang menerima dengan baik *Resolution on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in Asia* yang diusulkan oleh delegasi DPR-RI dalam bentuk Resolusi. Resolusi ini menekankan pentingnya kerjasama antara negara pengirim dengan negara penerima pekerja migran untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat serta mengurangi dampak negatif dari migrasi tenaga kerja. Komitmen dari kedua negara yaitu negara pengirim dan penerima menjadi sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak asasi para tenaga kerja migran.

Sidang *Assembly* ke-125 IPU di Bern, Swiss, baru-baru ini, telah berlangsung dengan lancar, dan dihadiri oleh delegasi DPR-RI. Secara substantif sidang majelis IPU ke 125 yang mengadopsi *IPU Strategic Plan 2012- 2017* di pandang sebagai keberhasilan kepemimpinan Presiden IPU yang di anggap sangat relevan dengan

tantangan global saat ini. Partisipasi Indonesia dalam sidang majelis IPU ke 125 dengan masukan substansi berkaitan dengan isu-isu global seperti *green economy*, perubahan iklim, hak atas kesehatan perempuan dan anak, pelucutan senjata nuklir dan isu-isu global lainnya mendapat apresiasi dari peserta sidang lainnya. Presiden IPU terpilih Mr. Abdelwahad Radi dari Marocco, berkomitmen untuk melanjutkan kepemimpinan dan komitmen Presiden IPU sebelumnya (Mr. Gurirab) dengan patokan pada IPU *Strategic Plan 2012- 2017*.

Sidang Dewan yang terhormat,

Satu bulan terakhir ini, beberapa bencana telah melanda negara-negara sahabat, antara lain gempa bumi di Turki dan banjir bandang di beberapa negara ASEAN. Bencana ini telah menimbulkan korban jiwa dan memporakporandakan fasilitas umum. Melalui forum ini, izinkan kami mengatasnamakan DPR RI menyampaikan duka cita kepada para korban dan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang terjadi. Mudah-mudahan, pemerintah negara-negara yang terkena bencana dapat segera menanggulangnya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum kami mengakhiri pidato penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2011–2012, perlu kami informasikan bahwa DPR-RI baru baru ini telah menerima penghargaan yaitu *pertama*: penghargaan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia kepada DPR-RI sebagai **Badan Publik Terbaik ke-3** dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan penghargaan ini, maka DPR-RI dinilai telah mewujudkan

transparansi selaku badan publik. *Kedua:* berdasar laporan Ombudsman Republik Indonesia tentang pelayanan publik di seluruh instansi pada triwulan IV 2010, DPR-RI dinilai telah memberikan **pelayanan publik secara baik**. *Ketiga:* terkait dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** oleh BPK terhadap laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2010. DPR RI telah menerima penghargaan dari Pemerintah RI/Wakil Presiden atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2010 dengan capaian **standar tertinggi dalam akuntansi dan laporan keuangan**. Dalam mempertahankan opini tersebut, baru baru ini telah ditandatangani *Nota Kesepahaman Kerja Sama* antara DPR-RI dengan BPKP. *Nota Kesepahaman* ini bertujuan membantu tugas BURT untuk melakukan pengawasan terhadap kesekretariatan jenderal dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikialah berbagai hal yang perlu kami sampaikan dalam kaitan dengan penutupan Masa Sidang I tahun sidang 2011 – 2012. Besok pagi, DPR RI akan menjalani masa reses singkat. Dewan akan memulai Masa Sidang II Tahun Sidang 2011-2012 pada tanggal 14 November. Pimpinan Dewan mengingatkan kepada seluruh Anggota untuk memanfaatkan masa reses sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan kinerja.

Berkaitan dengan datangnya Hari Besar Idul Adha 1432 H pada 6 November yang akan datang, melalui forum ini, izinkan kami mengucapkan Selamat Merayakan Hari Raya Kurban. Dan kepada

para anggota dewan yang akan melaksanakan ibadah haji, kami ucapkan selamat menjalankannya, semoga lancar dan menjadi haji mabrur. Amin.

Izinkanlah saya menutup rapat paripurna hari ini dengan mengucapkan: *alhamdulillahirobbil 'alamin* .

***Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.***

KETOK 3 X

Jakarta, 28 Oktober 2011

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DR. H. MARZUKI ALIE